

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompetensi kepala sekolah merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam meningkatkan mutu satuan pendidikan. Kepala sekolah dengan kompetensi yang dimilikinya mampu menciptakan lingkungan sekolah yang profesional dimulai dari dirinya dan menjalar kepada guru sehingga berdampak positif terhadap mutu peserta didik. Dengan perkataan lain, seorang kepala sekolah dengan lima kompetensi (kompetensi Kepripadian, Manajerial, Supervisi, Kewirausahaan dan Sosial) yang melekat dalam dirinya mampu membawa sekolah yang dipimpinnya menjadi bermutu.

Dinas Pendidikan selaku wadah formal mewakili pemerintah Negara Indonesia belum banyak melakukan improvisasi dalam rangka melahirkan kepala sekolah yang berkompetensi. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih rendahnya grade atau mutu pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan disebabkan salah satunya adalah kualitas kepala sekolah yang di bawah standar. Faktor ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian sehingga hasilnya dapat diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Dinas Pendidikan memiliki banyak sistem dan strategi untuk diterapkan atau diimplementasikan kepada satuan pendidikan. Namun harus diakui bahwa pelaksanaan di lapangan tidak seindah apa yang dikatakan atau diteorikan. Secara umum yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia yaitu sebuah sekolah dikepalai oleh seseorang yang tidak memiliki kompetensi sehingga apa yang menjadi kebijakan internal sekolah tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Dinas Pendidikan memiliki instrumen yang dapat diandalkan untuk merekrut para guru menjadi kepala sekolah. Instrumen disusun atau dikonstruksi sesuai dengan tuntutan zaman, salah satunya adalah memiliki lima kompetensi kepala sekolah. Hanya guru yang memenuhi syarat berhak untuk

diangkat menjadi kepala sekolah. Sebaliknya apabila Dinas Pendidikan melakukan politisasi jabatan kepala sekolah maka dipastikan mutu pendidikan akan mengalami kemunduruan jauh kebelakang. Di Negara Indonesia tercinta ini masih ada kepala daerah yang mengangkat sepala sekolah karena unsur jasa pada saat mencalonkan diri sebagai wali kota atau bupati. Hal ini sudah menjadi rahasia umum meskipun tidak semua daerah dalam Negara Republik Indonesia.

Pendidikan berperan penting dalam membangun kehidupan manusia berkembang. Perkembangan kehidupan manusia dari zaman ke zaman selalu dinamis dan memberikan warna tersendiri pada generasinya. Eksistensi pendidikan sebagai wadah untuk mencerdaskan manusia melalui aktivitas pembelajaran baik bersifat individu maupun kelompok. Pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, yaitu manusia yang cerdas otaknya sehingga diharapkan mampu memaksimalkan aktivitas akalnya untuk melahirkan sebuah ilmu pengetahuan baru berguna untuk kemaslahatan umat manusia di dunia.

Dinas Pendidikan selaku wadah formal mewakili pemerintah Negara Indonesia belum banyak melakukan improvisasi dalam rangka melahirkan kepala sekolah yang berkompetensi. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih rendahnya grade atau mutu pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan disebabkan salah satunya adalah kualitas kepala sekolah yang di bawah standar. Faktor ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian sehingga hasilnya dapat diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Dinas Pendidikan memiliki banyak sistem dan strategi untuk diterapkan atau diimplementasikan kepada satuan pendidikan. Namun harus diakui bahwa pelaksanaan di lapangan tidak seindah apa yang dikatakan atau diteorikan. Secara umum yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia yaitu sebuah sekolah dikepalai oleh seseorang yang tidak memiliki kompetensi sehingga apa yang menjadi kebijakan internal sekolah tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Dinas Pendidikan memiliki instrumen yang dapat diandalkan untuk merekrut para guru menjadi kepala sekolah. Instrumen disusun atau dikonstruksi sesuai dengan tuntutan zaman, salah satunya adalah memiliki lima kompetensi kepala sekolah. Hanya guru yang memenuhi syarat berhak untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Sebaliknya apabila Dinas Pendidikan melakukan politisasi jabatan kepala sekolah maka dipastikan mutu pendidikan akan mengalami kemunduruan jauh kebelakang. Di Negara Indonesia tercinta ini masih ada kepala daerah yang mengangkat kepala sekolah karena unsur jasa pada saat mencalonkan diri sebagai wali kota atau bupati. Hal ini sudah menjadi rahasia umum meskipun tidak semua daerah dalam Negara Republik Indonesia.

Pendidikan berperan penting dalam membangun kehidupan manusia berkembang. Perkembangan kehidupan manusia dari zaman ke zaman selalu dinamis dan memberikan warna tersendiri pada generasinya. Eksistensi pendidikan sebagai wadah untuk mencerdaskan manusia melalui aktivitas pembelajaran baik bersifat individu maupun kelompok. Pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, yaitu manusia yang cerdas otaknya sehingga diharapkan mampu memaksimalkan aktivitas akalnya untuk melahirkan sebuah ilmu pengetahuan baru berguna untuk kemaslahatan umat manusia di dunia.

Pendidikan hanya ada dan dikembangkan pada diri manusia sebagai salah satu makhluk Allah yang diberi kemampuan khusus untuk memahami dan mengembangkan kreativitas dalam hidup dan berkehidupan. Kemampuan khusus berupa akal pikiran ini sebagai pembeda dengan makhluk Allah yang lain. Kekuatan manusia terletak pada akalnya. Akal bersifat abstrak dan sebagai instrument untuk berpikir. Dengan perkataan lain, aktivitas berpikir merupakan refleksi atau bentuk konkret dari akal. Hasil dari pemikiran diaktualisasikan dalam bentuk teori secara tertulis. Oleh karena itu, kita berkomentar apabila sesuatu dinyatakan baik secara lisan maupun tulisan dengan ungkapan masuk akal/logis atau tidak masuk akal. Jadi dapat disimpulkan bahwa akal merupakan salah satu unsur dasar dalam diri manusia. Manusia tanpa akal

adalah boneka dan kehidupannya berjalan seperti makhluk (hewan) Allah yang lainnya. Manusia tanpa akal adalah makhluk Allah pertama yang punah di dunia ini.

Pendidikan merupakan jantungnya manusia. Pendidikan hadir dalam rangka untuk mengembangkan kehidupan manusia yang berkemajuan dan beradab sehingga satu dengan yang lain dapat berbagi baik itu berupa ilmu pengetahuan maupun teknologi. Oleh karena itu eksistensinya menjadi tumpuan manusia. Dengan perkataan lain, manusia dan pendidikan merupakan satu kesatuan dalam membentuk peradaban dunia. Pendidikan merupakan aktivitas memanusiakan manusia, yaitu manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan berkepribadian, serta berkarakter mandiri. Ketiga faktor ini sebagai barometer bagi manusia dalam rangka untuk mewarnai kehidupannya di dunia. Dengan adanya pendidikan maka kehidupan manusia menjadi terarah dan berkembang sesuai dengan zamannya.

Pendidikan diaktualisasikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah faktor internal dalam diri manusia berupa perkembangan intelektual dan emosional. Pendidikan hadir pada setiap manusia dan tidak memandang jenis kelamin, warna kulit, dan budaya. Hal ini sebagai bukti konkret bahwa pendidikan (berupa pengetahuan) mewarnai nuansa kehidupan manusia. Dengan perkataan lain, tingkat pendidikan seseorang merefleksikan kehidupannya, yaitu cara berpikir dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungannya.

Pendidikan diaktualisasikan melalui aktivitas pembelajaran bertujuan untuk membentuk kepribadian atau karakter peserta didik yang mandiri, bertanggung jawab, dan demokratis sehingga kehadirannya dapat memberikan nuansa positif bagi dirinya, negara, dan agama. Peradaban atau kemajuan dari zaman ke zaman disebabkan oleh eksistensi pendidikan berkemajuan. Dengan perkataan lain, pendidikan merupakan barometer kemajuan sebuah bangsa.

Sebagai institusi formal yang mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pendidikan, Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab strategis untuk mencetak kepala sekolah yang profesional dan berkompeten. Namun,

hingga saat ini, improvisasi dan inovasi dalam proses pembinaan serta rekrutmen kepala sekolah masih belum optimal. Kurangnya upaya signifikan ini tercermin dalam rendahnya kualitas atau mutu pendidikan secara umum, yang salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya kompetensi para kepala sekolah. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk melakukan studi yang hasilnya diharapkan dapat dijadikan acuan dan diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Meskipun Dinas Pendidikan telah merancang berbagai sistem dan strategi untuk mendukung kemajuan satuan pendidikan, realitas pelaksanaannya di lapangan sering kali jauh dari harapan. Antara konsep yang tertuang dalam kebijakan dan implementasinya di sekolah terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Dalam praktiknya, masih banyak sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang tidak memiliki kompetensi manajerial, pedagogik, sosial, kepribadian, dan supervisi yang memadai. Akibatnya, kebijakan internal sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan sering kali stagnan dan tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Padahal, Dinas Pendidikan sebenarnya telah memiliki perangkat atau instrumen seleksi kepala sekolah yang cukup sistematis dan dirancang sesuai dengan kebutuhan zaman, termasuk standar lima kompetensi utama kepala sekolah. Idealnya, hanya guru yang telah memenuhi kriteria tertentu yang layak diangkat sebagai kepala sekolah. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat praktik-praktik politisasi jabatan di mana pengangkatan kepala sekolah lebih didasarkan pada pertimbangan non-profesional, seperti balas jasa politik pada saat pemilihan kepala daerah. Fenomena ini meskipun tidak terjadi di semua wilayah, tetap menjadi bagian dari realitas birokrasi pendidikan di Indonesia dan berpotensi besar menghambat kemajuan mutu pendidikan.

Pendidikan sendiri memiliki peran fundamental dalam menciptakan peradaban yang lebih baik. Sepanjang sejarah, pendidikan selalu menjadi pendorong utama dalam perkembangan kehidupan manusia yang dinamis. Melalui proses pembelajaran baik secara individu maupun kolektif, pendidikan menjadi instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan utama

pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia, membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu menggunakan akal pikirannya untuk melahirkan ilmu pengetahuan dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kepala sekolah yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

Sebagai institusi formal yang mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pendidikan, Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab strategis untuk mencetak kepala sekolah yang profesional dan berkompeten. Namun, hingga saat ini, improvisasi dan inovasi dalam proses pembinaan serta rekrutmen kepala sekolah masih belum optimal. Kurangnya upaya signifikan ini tercermin dalam rendahnya kualitas atau mutu pendidikan secara umum, yang salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya kompetensi para kepala sekolah. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk melakukan studi yang hasilnya diharapkan dapat dijadikan acuan dan diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Meskipun Dinas Pendidikan telah merancang berbagai sistem dan strategi untuk mendukung kemajuan satuan pendidikan, realitas pelaksanaannya di lapangan sering kali jauh dari harapan. Antara konsep yang tertuang dalam kebijakan dan implementasinya di sekolah terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Dalam praktiknya, masih banyak sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang tidak memiliki kompetensi manajerial, pedagogik, sosial, kepribadian, dan supervisi yang memadai. Akibatnya, kebijakan internal sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan sering kali stagnan dan tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Padahal, Dinas Pendidikan sebenarnya telah memiliki perangkat atau instrumen seleksi kepala sekolah yang cukup sistematis dan dirancang sesuai dengan kebutuhan zaman, termasuk standar lima kompetensi utama kepala sekolah. Idealnya, hanya guru yang telah memenuhi kriteria tertentu yang layak diangkat sebagai kepala sekolah. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat praktik-praktik politisasi jabatan di mana pengangkatan kepala sekolah lebih

didasarkan pada pertimbangan non-profesional, seperti balas jasa politik pada saat pemilihan kepala daerah. Fenomena ini meskipun tidak terjadi di semua wilayah, tetap menjadi bagian dari realitas birokrasi pendidikan di Indonesia dan berpotensi besar menghambat kemajuan mutu pendidikan.

Pendidikan sendiri memiliki peran fundamental dalam menciptakan peradaban yang lebih baik. Sepanjang sejarah, pendidikan selalu menjadi pendorong utama dalam perkembangan kehidupan manusia yang dinamis. Melalui proses pembelajaran baik secara individu maupun kolektif, pendidikan menjadi instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan utama pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia, membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu menggunakan akal pikirannya untuk melahirkan ilmu pengetahuan dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kepala sekolah yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

Sebagai institusi formal yang mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pendidikan, Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab strategis untuk mencetak kepala sekolah yang profesional dan berkompeten. Namun, hingga saat ini, improvisasi dan inovasi dalam proses pembinaan serta rekrutmen kepala sekolah masih belum optimal. Kurangnya upaya signifikan ini tercermin dalam rendahnya kualitas atau mutu pendidikan secara umum, yang salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya kompetensi para kepala sekolah. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk melakukan studi yang hasilnya diharapkan dapat dijadikan acuan dan diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Meskipun Dinas Pendidikan telah merancang berbagai sistem dan strategi untuk mendukung kemajuan satuan pendidikan, realitas pelaksanaannya di lapangan sering kali jauh dari harapan. Antara konsep yang tertuang dalam kebijakan dan implementasinya di sekolah terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Dalam praktiknya, masih banyak sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang tidak memiliki kompetensi manajerial,

pedagogik, sosial, kepribadian, dan supervisi yang memadai. Akibatnya, kebijakan internal sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan sering kali stagnan dan tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Padahal, Dinas Pendidikan sebenarnya telah memiliki perangkat atau instrumen seleksi kepala sekolah yang cukup sistematis dan dirancang sesuai dengan kebutuhan zaman, termasuk standar lima kompetensi utama kepala sekolah. Idealnya, hanya guru yang telah memenuhi kriteria tertentu yang layak diangkat sebagai kepala sekolah. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat praktik-praktik politisasi jabatan di mana pengangkatan kepala sekolah lebih didasarkan pada pertimbangan non-profesional, seperti balas jasa politik pada saat pemilihan kepala daerah. Fenomena ini meskipun tidak terjadi di semua wilayah, tetap menjadi bagian dari realitas birokrasi pendidikan di Indonesia dan berpotensi besar menghambat kemajuan mutu pendidikan.

Pendidikan sendiri memiliki peran fundamental dalam menciptakan peradaban yang lebih baik. Sepanjang sejarah, pendidikan selalu menjadi pendorong utama dalam perkembangan kehidupan manusia yang dinamis. Melalui proses pembelajaran baik secara individu maupun kolektif, pendidikan menjadi instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan utama pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia, membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu menggunakan akal pikirannya untuk melahirkan ilmu pengetahuan dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kepala sekolah yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

Sebagai institusi formal yang mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pendidikan, Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab strategis untuk mencetak kepala sekolah yang profesional dan berkompeten. Namun, hingga saat ini, improvisasi dan inovasi dalam proses pembinaan serta rekrutmen kepala sekolah masih belum optimal. Kurangnya upaya signifikan ini tercermin dalam rendahnya kualitas atau mutu pendidikan secara umum, yang salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya kompetensi para kepala

sekolah. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk melakukan studi yang hasilnya diharapkan dapat dijadikan acuan dan diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Meskipun Dinas Pendidikan telah merancang berbagai sistem dan strategi untuk mendukung kemajuan satuan pendidikan, realitas pelaksanaannya di lapangan sering kali jauh dari harapan. Antara konsep yang tertuang dalam kebijakan dan implementasinya di sekolah terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Dalam praktiknya, masih banyak sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang tidak memiliki kompetensi manajerial, pedagogik, sosial, kepribadian, dan supervisi yang memadai. Akibatnya, kebijakan internal sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan sering kali stagnan dan tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Padahal, Dinas Pendidikan sebenarnya telah memiliki perangkat atau instrumen seleksi kepala sekolah yang cukup sistematis dan dirancang sesuai dengan kebutuhan zaman, termasuk standar lima kompetensi utama kepala sekolah. Idealnya, hanya guru yang telah memenuhi kriteria tertentu yang layak diangkat sebagai kepala sekolah. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat praktik-praktik politisasi jabatan di mana pengangkatan kepala sekolah lebih didasarkan pada pertimbangan non-profesional, seperti balas jasa politik pada saat pemilihan kepala daerah. Fenomena ini meskipun tidak terjadi di semua wilayah, tetap menjadi bagian dari realitas birokrasi pendidikan di Indonesia dan berpotensi besar menghambat kemajuan mutu pendidikan.

Pendidikan sendiri memiliki peran fundamental dalam menciptakan peradaban yang lebih baik. Sepanjang sejarah, pendidikan selalu menjadi pendorong utama dalam perkembangan kehidupan manusia yang dinamis. Melalui proses pembelajaran baik secara individu maupun kolektif, pendidikan menjadi instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan utama pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia, membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu menggunakan akal pikirannya untuk melahirkan ilmu pengetahuan dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kepala

sekolah yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

Sebagai institusi formal yang mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pendidikan, Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab strategis untuk mencetak kepala sekolah yang profesional dan berkompeten. Namun, hingga saat ini, improvisasi dan inovasi dalam proses pembinaan serta rekrutmen kepala sekolah masih belum optimal. Kurangnya upaya signifikan ini tercermin dalam rendahnya kualitas atau mutu pendidikan secara umum, yang salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya kompetensi para kepala sekolah. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk melakukan studi yang hasilnya diharapkan dapat dijadikan acuan dan diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Meskipun Dinas Pendidikan telah merancang berbagai sistem dan strategi untuk mendukung kemajuan satuan pendidikan, realitas pelaksanaannya di lapangan sering kali jauh dari harapan. Antara konsep yang tertuang dalam kebijakan dan implementasinya di sekolah terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Dalam praktiknya, masih banyak sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang tidak memiliki kompetensi manajerial, pedagogik, sosial, kepribadian, dan supervisi yang memadai. Akibatnya, kebijakan internal sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan sering kali stagnan dan tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Padahal, Dinas Pendidikan sebenarnya telah memiliki perangkat atau instrumen seleksi kepala sekolah yang cukup sistematis dan dirancang sesuai dengan kebutuhan zaman, termasuk standar lima kompetensi utama kepala sekolah. Idealnya, hanya guru yang telah memenuhi kriteria tertentu yang layak diangkat sebagai kepala sekolah. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat praktik-praktik politisasi jabatan di mana pengangkatan kepala sekolah lebih didasarkan pada pertimbangan non-profesional, seperti balas jasa politik pada saat pemilihan kepala daerah. Fenomena ini meskipun tidak terjadi di semua wilayah, tetap menjadi bagian dari realitas birokrasi pendidikan di Indonesia dan berpotensi besar menghambat kemajuan mutu pendidikan.

Pendidikan sendiri memiliki peran fundamental dalam menciptakan peradaban yang lebih baik. Sepanjang sejarah, pendidikan selalu menjadi pendorong utama dalam perkembangan kehidupan manusia yang dinamis. Melalui proses pembelajaran baik secara individu maupun kolektif, pendidikan menjadi instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan utama pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia, membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu menggunakan akal pikirannya untuk melahirkan ilmu pengetahuan dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kepala sekolah yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

Sebagai institusi formal yang mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pendidikan, Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab strategis untuk mencetak kepala sekolah yang profesional dan berkompeten. Namun, hingga saat ini, improvisasi dan inovasi dalam proses pembinaan serta rekrutmen kepala sekolah masih belum optimal. Kurangnya upaya signifikan ini tercermin dalam rendahnya kualitas atau mutu pendidikan secara umum, yang salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya kompetensi para kepala sekolah. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk melakukan studi yang hasilnya diharapkan dapat dijadikan acuan dan diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Meskipun Dinas Pendidikan telah merancang berbagai sistem dan strategi untuk mendukung kemajuan satuan pendidikan, realitas pelaksanaannya di lapangan sering kali jauh dari harapan. Antara konsep yang tertuang dalam kebijakan dan implementasinya di sekolah terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Dalam praktiknya, masih banyak sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang tidak memiliki kompetensi manajerial, pedagogik, sosial, kepribadian, dan supervisi yang memadai. Akibatnya, kebijakan internal sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan sering kali stagnan dan tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Padahal, Dinas Pendidikan sebenarnya telah memiliki perangkat atau instrumen seleksi kepala sekolah yang cukup sistematis dan dirancang sesuai dengan kebutuhan zaman, termasuk standar lima kompetensi utama kepala sekolah. Idealnya, hanya guru yang telah memenuhi kriteria tertentu yang layak diangkat sebagai kepala sekolah. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat praktik-praktik politisasi jabatan di mana pengangkatan kepala sekolah lebih didasarkan pada pertimbangan non-profesional, seperti balas jasa politik pada saat pemilihan kepala daerah. Fenomena ini meskipun tidak terjadi di semua wilayah, tetap menjadi bagian dari realitas birokrasi pendidikan di Indonesia dan berpotensi besar menghambat kemajuan mutu pendidikan.

Pendidikan sendiri memiliki peran fundamental dalam menciptakan peradaban yang lebih baik. Sepanjang sejarah, pendidikan selalu menjadi pendorong utama dalam perkembangan kehidupan manusia yang dinamis. Melalui proses pembelajaran baik secara individu maupun kolektif, pendidikan menjadi instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan utama pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia, membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu menggunakan akal pikirannya untuk melahirkan ilmu pengetahuan dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kepala sekolah yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

Sebagai institusi formal yang mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pendidikan, Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab strategis untuk mencetak kepala sekolah yang profesional dan berkompeten. Namun, hingga saat ini, improvisasi dan inovasi dalam proses pembinaan serta rekrutmen kepala sekolah masih belum optimal. Kurangnya upaya signifikan ini tercermin dalam rendahnya kualitas atau mutu pendidikan secara umum, yang salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya kompetensi para kepala sekolah. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk melakukan studi yang hasilnya diharapkan dapat dijadikan acuan dan diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Meskipun Dinas Pendidikan telah merancang berbagai sistem dan strategi untuk mendukung kemajuan satuan pendidikan, realitas pelaksanaannya di lapangan sering kali jauh dari harapan. Antara konsep yang tertuang dalam kebijakan dan implementasinya di sekolah terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Dalam praktiknya, masih banyak sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang tidak memiliki kompetensi manajerial, pedagogik, sosial, kepribadian, dan supervisi yang memadai. Akibatnya, kebijakan internal sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan sering kali stagnan dan tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Padahal, Dinas Pendidikan sebenarnya telah memiliki perangkat atau instrumen seleksi kepala sekolah yang cukup sistematis dan dirancang sesuai dengan kebutuhan zaman, termasuk standar lima kompetensi utama kepala sekolah. Idealnya, hanya guru yang telah memenuhi kriteria tertentu yang layak diangkat sebagai kepala sekolah. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat praktik-praktik politisasi jabatan di mana pengangkatan kepala sekolah lebih didasarkan pada pertimbangan non-profesional, seperti balas jasa politik pada saat pemilihan kepala daerah. Fenomena ini meskipun tidak terjadi di semua wilayah, tetap menjadi bagian dari realitas birokrasi pendidikan di Indonesia dan berpotensi besar menghambat kemajuan mutu pendidikan.

Pendidikan sendiri memiliki peran fundamental dalam menciptakan peradaban yang lebih baik. Sepanjang sejarah, pendidikan selalu menjadi pendorong utama dalam perkembangan kehidupan manusia yang dinamis. Melalui proses pembelajaran baik secara individu maupun kolektif, pendidikan menjadi instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan utama pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia, membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu menggunakan akal pikirannya untuk melahirkan ilmu pengetahuan dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kepala sekolah yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

Sebagai institusi formal yang mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pendidikan, Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab strategis untuk mencetak kepala sekolah yang profesional dan berkompeten. Namun, hingga saat ini, improvisasi dan inovasi dalam proses pembinaan serta rekrutmen kepala sekolah masih belum optimal. Kurangnya upaya signifikan ini tercermin dalam rendahnya kualitas atau mutu pendidikan secara umum, yang salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya kompetensi para kepala sekolah. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk melakukan studi yang hasilnya diharapkan dapat dijadikan acuan dan diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Meskipun Dinas Pendidikan telah merancang berbagai sistem dan strategi untuk mendukung kemajuan satuan pendidikan, realitas pelaksanaannya di lapangan sering kali jauh dari harapan. Antara konsep yang tertuang dalam kebijakan dan implementasinya di sekolah terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Dalam praktiknya, masih banyak sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang tidak memiliki kompetensi manajerial, pedagogik, sosial, kepribadian, dan supervisi yang memadai. Akibatnya, kebijakan internal sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan sering kali stagnan dan tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Padahal, Dinas Pendidikan sebenarnya telah memiliki perangkat atau instrumen seleksi kepala sekolah yang cukup sistematis dan dirancang sesuai dengan kebutuhan zaman, termasuk standar lima kompetensi utama kepala sekolah. Idealnya, hanya guru yang telah memenuhi kriteria tertentu yang layak diangkat sebagai kepala sekolah. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat praktik-praktik politisasi jabatan di mana pengangkatan kepala sekolah lebih didasarkan pada pertimbangan non-profesional, seperti balas jasa politik pada saat pemilihan kepala daerah. Fenomena ini meskipun tidak terjadi di semua wilayah, tetap menjadi bagian dari realitas birokrasi pendidikan di Indonesia dan berpotensi besar menghambat kemajuan mutu pendidikan.

Pendidikan sendiri memiliki peran fundamental dalam menciptakan peradaban yang lebih baik. Sepanjang sejarah, pendidikan selalu menjadi

pendorong utama dalam perkembangan kehidupan manusia yang dinamis. Melalui proses pembelajaran baik secara individu maupun kolektif, pendidikan menjadi instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan utama pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia, membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu menggunakan akal pikirannya untuk melahirkan ilmu pengetahuan dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kepala sekolah yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

Sebagai institusi formal yang mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pendidikan, Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab strategis untuk mencetak kepala sekolah yang profesional dan berkompeten. Namun, hingga saat ini, improvisasi dan inovasi dalam proses pembinaan serta rekrutmen kepala sekolah masih belum optimal. Kurangnya upaya signifikan ini tercermin dalam rendahnya kualitas atau mutu pendidikan secara umum, yang salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya kompetensi para kepala sekolah. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk melakukan studi yang hasilnya diharapkan dapat dijadikan acuan dan diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Meskipun Dinas Pendidikan telah merancang berbagai sistem dan strategi untuk mendukung kemajuan satuan pendidikan, realitas pelaksanaannya di lapangan sering kali jauh dari harapan. Antara konsep yang tertuang dalam kebijakan dan implementasinya di sekolah terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Dalam praktiknya, masih banyak sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang tidak memiliki kompetensi manajerial, pedagogik, sosial, kepribadian, dan supervisi yang memadai. Akibatnya, kebijakan internal sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan sering kali stagnan dan tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Padahal, Dinas Pendidikan sebenarnya telah memiliki perangkat atau instrumen seleksi kepala sekolah yang cukup sistematis dan dirancang sesuai dengan kebutuhan zaman, termasuk standar lima kompetensi utama kepala

sekolah. Idealnya, hanya guru yang telah memenuhi kriteria tertentu yang layak diangkat sebagai kepala sekolah. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat praktik-praktik politisasi jabatan di mana pengangkatan kepala sekolah lebih didasarkan pada pertimbangan non-profesional, seperti balas jasa politik pada saat pemilihan kepala daerah. Fenomena ini meskipun tidak terjadi di semua wilayah, tetap menjadi bagian dari realitas birokrasi pendidikan di Indonesia dan berpotensi besar menghambat kemajuan mutu pendidikan.

Pendidikan sendiri memiliki peran fundamental dalam menciptakan peradaban yang lebih baik. Sepanjang sejarah, pendidikan selalu menjadi pendorong utama dalam perkembangan kehidupan manusia yang dinamis. Melalui proses pembelajaran baik secara individu maupun kolektif, pendidikan menjadi instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan utama pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia, membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu menggunakan akal pikirannya untuk melahirkan ilmu pengetahuan dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kepala sekolah yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

Permasalahan yang sering muncul adalah tidak semua kepala sekolah mempunyai program kerja supervisi akademik, tidak semua kepala sekolah mempunyai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan rencana tindak lanjut dalam supervisi akademik. Demikian juga pada kondisi nyata di sekolah binaan masih ada persoalan yang dihadapi kepala sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan PK-Guru. Kepala sekolah masih beranggapan bahwa PK-Guru hanya untuk guru ASN, tidak semua kepala sekolah binaan melaksanakan PK-Guru tahun 2021, kepala sekolah masih beranggapan dan memiliki hambatan dalam menyusun PK-Guru, maka kondisi nyata yang terjadi di beberapa sekolah binaan tidak memiliki dokumen arsip PK-Guru Tahun 2021 terutama di sekolah yang tahun 2021 bukan menjadi bagian sekolah binaan sebagai pengawas pembina. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab pengawas pembina untuk melaksanakan tugas

pokok fungsinya sebagai pembimbing, pelatih, pembina, penilai, mentor dan *coach* pada sekolah binaannya dan sekolah lainnya dalam wilayah gugus untuk mengadakan bimbingan pelatihan di gugus dan atau kumpulan klaster wilayah binaan dilanjutkan pembinaan pada sekolah binaannya sehingga permasalahan tersebut di atas dapat dicarai solusinya secara bersama.

Berdasarkan deskripsi tersebut maka peneliti merasa terpenggil untuk melakukan penelitian ini dengan judul Strategi Kepala Dinas Pendidikan Dalam Membina Kompetensi Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Alasan pemilihan Dinas Pendidikan Kota dan Kab. Tangerang sebagai lokus dalam penelitian ini, bahwa di Dinas Pendidikan Kota dan Kab. Tangerang terdapat 410 SMP dan 168 swasta sementara 33 Negeri, dalam hal ini Pemkot Kota Tangerang menganggarkan untuk Dinas Pendidikan Kota Tangerang 1,4 triliun sementara di Dinas Pendidikan Kab Tangerang terdapat 461 SMP, 366 swasta dan 95 negeri dengan anggaran 2 triliun , 24, 6 % APBD Kabupaten Tangerang untuk pendidikan. dengan anggran yang cukup besar ini apa yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Tangerang terhadap kompetensi kepala SMP Negeri.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

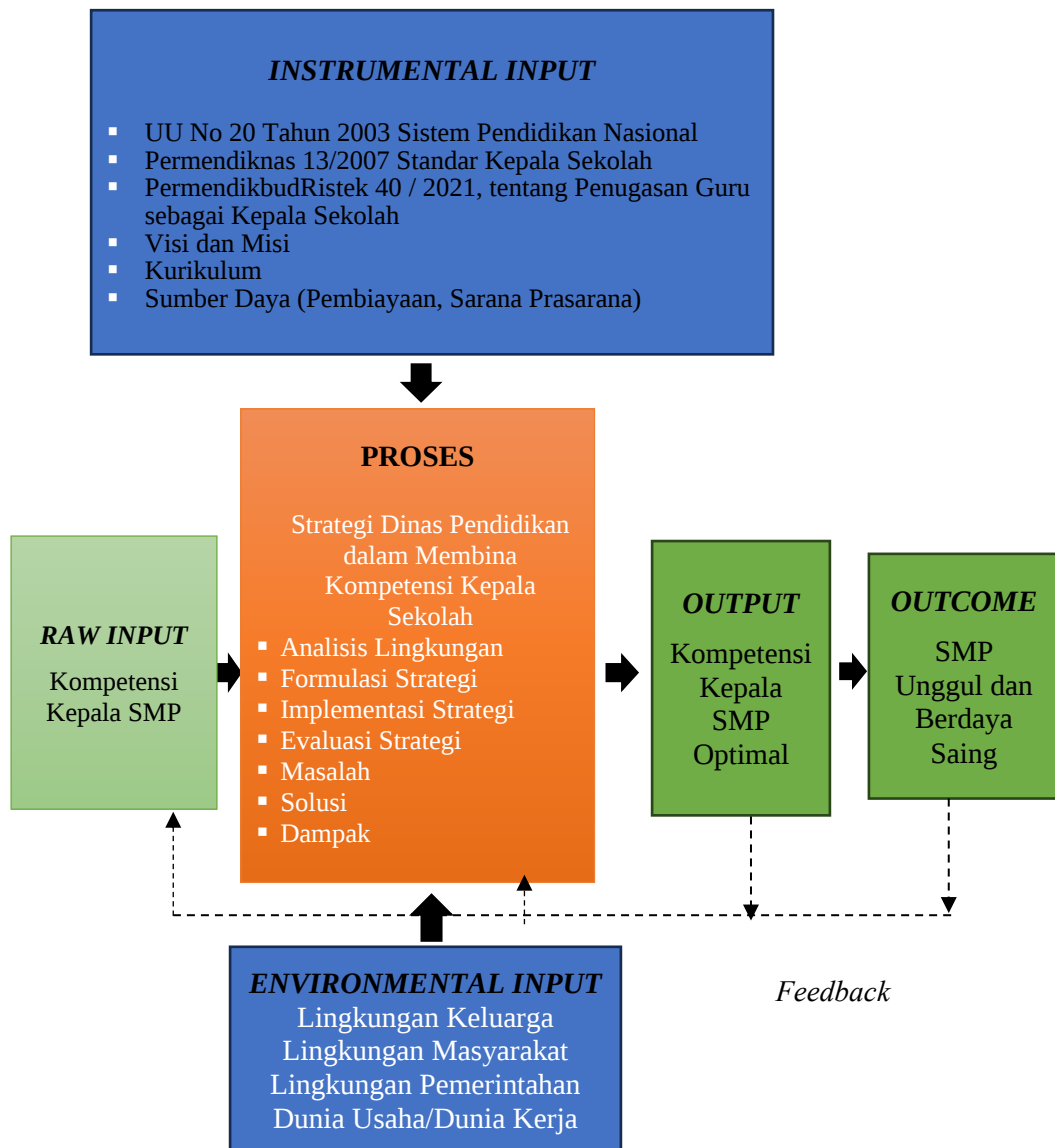
1. Perumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada strategi Kepala Dinas Pendidikan dalam melakukan pembinaan terhadap Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang sehingga mereka memiliki kemampuan sesuai tuntutan kompetensi yang harus dipenuhinya. Dalam pernyataan lain sebagaimana tercermin dalam judul disertasi ini, penelitian berfokus pada strategi kepala dinas pendidikan dalam membina kompetensi kepala sekolah sehingga berdampak positif pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia umumnya, Kota dan Kabupaten Tangerang khususnya.

Berpijak pada latar belakang permasalahan yang mengemuka, dapat ditegaskan rumusan masalah secara umum dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan ‘Bagaimana strategi kepala dinas pendidikan dalam membina kompetensi Kepala SMPN di Kota dan Kabupaten Tangerang? Selanjutnya rumusan umum ini dapat dijabarkan dalam serangkaian aspek kajian yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Analisis lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, untuk kepentingan pengembangan Strategi Dinas Pendidikan Dalam Membina Kompetensi Kepala Sekolah pada satuan pendidikan SMPN (Kepala SMPN) di Kota dan Kabupaten Tangerang;
- b. Formulasi strategi yang dirumuskan Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala SMPN di Kota dan Kabupaten Tangerang;
- c. Implementasi strategi yang dirumuskan Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala SMPN dimaksud;
- d. Evaluasi strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala SMPN dimaksud;
- e. Masalah atau kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala SMPN dimaksud;
- f. Solusi yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala SMP dimaksud dan ;
- g. Dampak pembinaan terhadap peningkatan kompetensi kepala SMPN di Kota dan Kab. Tangerang.

Perumusan masalah di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk bagan atau matriks sebagai berikut :



Gambar 1.2 Perumusan Masalah

Tampak pada bagan di atas bahwa kompetensi kepala sekolah (raw input) melalui strategi dinas pendidikan dalam mengoptimalkan kompetensi kepala sekolah (*process*), akan menjadikan kompetensi kepala sekolah optimal (*output*) dan memungkinkan atau berpotensi menjadikan sekolah unggul dan berdaya saing (*outcome*), bersama regulasi dan sumber daya sekolah (*instrumental input*) serta lingkungan (*environmental input*), Secara rinci dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- 1) *Raw input* dalam penelitian ini adalah kompetensi dasar yang dimiliki kepala sekolah sesuai regulasi yang berlaku, yaitu meliputi: kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial.
- 2) *Process* atau keseluruhan usaha serta tahapan yang dilakukan agar kompetensi kepala sekolah, dalam hal ini adalah strategi Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota dan Kabupaten Tangerang. Secara garis besar proses ini merujuk pada konsep manajemen strategis, meliputi : analisis lingkungan, formulasi atau perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Dalam penelitian ini, ditambahkan ke dalam proses dimaksud adalah masalah atau kendala yang dihadapi, serta solusi atau pemecahan masalah yang dicanangkan oleh Dinas pendidikan dalam membina kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), di Kota dan Kabupaten Tangerang dan dampaknya.
- 3) *Output* atau hasil yang dikehendaki adalah kompetensi kepala sekolah optimal, artinya semua kecakapan atau keterampilan dasar yang disyaratkan pada kepala sekolah benar-benar dalam dicapai. Kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial dalam diaktualisasikan oleh kepala sekolah dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.
- 4) *Outcome* atau dampak yang diharapkan timbul dari proses dan hasil tersebut adalah terwujudnya sekolah, dalam hal ini Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), di Kota dan Kabupaten Tangerang, unggul dan berdaya saing. Unggul artinya dipandang sebagai sekolah yang memiliki posisi terbaik dan diperhitungkan karena pengelolaan yang baik dan raihan prestasi yang juga baik, sementara berdaya saing berarti mampu berkompetisi di antara sesama sekolah setaraf dalam mencapai mutu pembelajaran dan pendidikan yang diselenggarakannya.
- 5) *Instrumental input* atau masukan berupa perangkat dalam penelitian ini secara garis besar terdiri dari regulasi dan sumber daya (*resources*). Regulasi terkait di antaranya adalah UU No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Sekolah, dan Permendikbud Ristek No. 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah/Sekolah. Sumber daya dalam kaitan ini selain visi-misi dan kebijakan lembaga, serta kurikulum yang

dikembangkan untuk setiap sekolah, juga sumber daya meliputi keuangan, sarana prasarana dan penunjang lainnya. Keseluruhan perangkat ini turut menentukan/mempengaruhi proses pengembangan strategi kepala dinas pendidikan dalam mengoptimalkan kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota dan Kabupaten Tangerang.

- 6) *Environmental input* atau masukan yang bersumber lingkungan yang turut pula mempengaruhi proses tersebut, meliputi lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintah dan dunia kerja (usaha/industri). Pada dasarnya lingkungan yang dimaksud adalah semua pihak yang memiliki kaitan kepentingan (*stakeholders*) dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang dibawahkannya di Kota dan Kabupaten Tangerang.

Dampak (*outcome*) maupun hasil (*output*) dalam bagan tersebut ditampilkan sebagai umpan balik (*feedback*) yang secara tidak langsung merupakan masukan terhadap proses. Pengolah umpan balik ini merujuk pada kaidah umum bahwa apabila hasil dan dampak yang ditimbulkannya baik, maka semua upaya dalam tahapan proses itu bisa dilanjutkan, sebaliknya apabila hasil dan dampak yang ditimbulkannya itu kurang sesuai atau tidak baik sebagaimana diharapkan, maka umpan balik tersebut menjadi bahan untuk koreksi atau perbaikan ke depan.

2. Pembatasan Masalah

Perumusan masalah ditegaskan bahwa strategi kepala Dinas Pendidikan perlu dikembangkan untuk membina kompetensi kepala sekolah, dalam hal ini Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), di Kota dan Kabupaten Tangerang. Pengembangan strategi dimaksud merujuk pada konsep manajemen strategis, mencakup; analisis lingkungan strategis, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi, ditambah dengan aspek kajian lain yaitu masalah atau kendala yang dihadapi, solusi atas permasalahan, dan dampaknya.

Selanjutnya masing-masing dari ketujuh aspek tersebut dalam penelitian ini dibatasi pada ruang kajian (yang kemudian ditentukan sebagai indikator), sebagai berikut:

- a. Analisis lingkungan strategis, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan sebagai berikut:
 - 1) ALI (Analisis lingkungan Internal) yang dianalisis menggunakan pendekatan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).
 - 2) ALE (Analisis lingkungan Eksternal) yang dianalisis menggunakan pendekatan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).
 - 3) (SWOT Analysis).
- b. Formulasi strategi yang dirumuskan Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), meliputi :
 - 1) Visi dan Misi.
 - 2) Tujuan dan Sasaran.
 - 3) Strategi.
 - 4) Kebijakan.
- c. Implementasi strategi yang telah dirumuskan oleh Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), meliputi:
 - 1) Program.
 - 2) *Budget* atau anggaran .
 - 3) Prosedur.
- d. Evaluasi implementasi strategi Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), meliputi;
 - 1) Monitoring.
 - 2) Evaluasi.
 - 3) Hasil.
- e. Masalah yang dihadapi oleh Kepala Dinas Pendidikan dalam pengembangan strategi membina kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), meliputi:
 - 1) Teknis.

- 2) Nonteknis.
- f. Solusi pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dalam pengembangan strategi membina kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), meliputi:
 - 1) Teknis.
 - 2) Nonteknis.
- g. Dampak pembinaan terhadap peningkatan kompetensi kepala SMPN di Kota dan Kab Tangerang meliputi:
 - 1) meningkatkan kemampuan manajerial kepala sekolah;
 - 2) menghasilkan kepala sekolah yang mampu menjadi pemimpin perubahan di lingkungan sekolah dan;
 - 3) meningkatkan kemampuan supervise. Kepala sekolah dapat memberikan bimbingan efektif kepada guru.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Umum
 Tujuan umum penelitian ini menggambarkan atau deskripsi hasil analisis mengenai strategi Kepala Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), di Kota dan Kabupaten Tangerang;
- b. Khusus
 Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi hasil analisis mengenai :
 - 1) Analisis lingkungan strategis, yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mengembangkan strategi membina kompetensi kepala sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), di Kota dan Kabupaten Tangerang.
 - 2) Formulasi strategi yang dirumuskan Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dimaksud.

- 3) Implementasi strategi yang dirumuskan Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dimaksud.
- 4) Evaluasi strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dimaksud.
- 5) Masalah atau kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dimaksud.
- 6) Solusi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dimaksud.
- 7) Dampak. Pembinaan terhadap peningkatan kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota dan Kab. Tangerang.

2. Manfaat

a. Teoretis

Manfaat akademik atau teoretis dari penelitian ini adalah memperkaya khasnah keilmuan tentang pengembangan strategi yang diinisiasi dan dikembangkan dinas pendidikan sebagai penyelenggaran pendidikan di tingkat meso dalam membina kompetensi kepala sekolah sebagai pengelola pendidikan di tingkat satuan atau mikro, dalam hal ini Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Penelitian ini pun juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan konsep manajemen dan strategi yang diterapkan pada pembinaan para kepala sekolah agar kompetensi yang dimilikinya optimal dan pada gilirannya dapat berkontribusi pada capaian sekolah unggul dan berdaya saing, serta meningkatnya mutu pembelajaran dan pendidikan.

b. Praktis

Dalam tetaran praktis peneltian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif sebagai informasi dalam mengembangkan inisiasi strategis dalam mengoptimalkan kompetensi para kepala sekolah, khususnya Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), di Kota dan Kabupaten Tangerang. Hal ini perlu dilakukan untuk turut berkontribusi pada upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara umum dan mutu pendidikan kota/kabupaten Tangerang khususnya.
- 2) Bagi satuan pendidikan, dalam hal ini Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), hasil penilitian diharapkan dapat memberikan masukan berharga dalam pengembangan program pembinaan kepala sekolah dan guru sebagai calon kepala sekolah sehingga dapat meningkatkan kinerja sekolah. Hasil penelitian ini pun diharapkan bermanfaat bagi sekolah dalam meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan para guru sehingga berpotensi untuk dapat memberikan sumbangsih besar dalam peningakatan mutu pembelajaran dan pendidikan.
- 3) Bagi kepala sekolah dan para guru, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mengembangkan kompetensi yang disyaratkan untuk dipenuhi sehingga bisa menjadi sosok penting dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 4) Bagi para peneliti lain, selain sebagai referensi, hasil penelitian ini diharapkan mengilhami atau memberikan inspirasi untuk melakukan kajian secara lebih mendalam terkait strategi pengembangan kompetensi dan membina kompetensi kepala sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Hal ini penting untuk semakin memperkaya temuan dan analisis, juga kian

mendalam agar dapat dihasilkan konstruksi dan model paling tepat untuk hal dimaksud.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana analisis lingkungan strategis, yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mengembangkan strategi membina membina kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota dan Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana formulasi strategi yang dirumuskan Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota dan Kabupaten Tangerang?
3. Bagaimana implementasi strategi yang dirumuskan Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), di Kota dan Kabupaten Tangerang?
4. Bagaimana evaluasi strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), di Kota dan Kabupaten Tangerang?
5. Apa saja masalah atau kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam Membina kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), di Kota dan Kabupaten Tangerang?
6. Apa sajakah solusi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), di Kota dan Kabuoaten Tangerang ?
7. Apa sajakah dampak pembinaan terhadap peningkatan kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota dan Kab.Tangerang ?